

BAB III

Dinamika Hubungan Bilateral Jepang-Indonesia dan Kebijakan Bebas Visa Jepang

Sejarah panjang yang dialami Jepang menjadikan sebuah pelajaran bagi bangsa Jepang. Kekalahan pada Perang Dunia II mengakibatkan berbagai macam perubahan yang dialami oleh negeri Sakura tersebut. Dengan penepatan janji bahwa Jepang akan membangun negaranya melalui pembangunan ekonomi, dan mengesampingkan pada sektor militernya. Jepang mulai mencari berbagai aliansi yang mampu membantunya untuk bangkit dari keterpurukan, hingga terjalinlah hubungan bilateral antara Jepang dengan Indonesia. Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai dinamika hubungan kerjasama Jepang dengan Indonesia pada sektor ekonomi dan pariwisata (Dalam bidang sosial-budaya) sekaligus mengenai kemunculan Kebijakan Bebas Visa yang diberikan oleh Jepang terhadap Indonesia.

A. Dinamika Hubungan Bilateral Jepang-Indonesia

Dengan adanya latar belakang kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, bentuk kerjasama sektor ekonomi merupakan suatu hal mutlak bagi Jepang untuk membangun kembali negaranya yang tergoncang. Untuk pembangunan dalam sektor ekonomi, Jepang mulai melakukan berbagai aliansi dengan beberapa negara salah satunya Indonesia. Tidak dalam kerjasama bidang ekonomi saja, namun lambat laun perubahan orientasi Jepang juga memunculkan suatu bentuk ekonomi kreatif salah satunya yaitu pada bidang pariwisata. Di mana sektor pariwisata tersebut merupakan suatu alternative yang mulai dilirik Jepang dalam membantu perkembangan sektor ekonomi domestiknya selain melalui industri yang telah lama ada. Sektor Pariwisata sangat menarik untuk di kaji, karena berhubungan dengan latar belakang politik

isolasionis yang dialami oleh Jepang. Karena pada dasarnya Jepang bukanlah negara yang berorientasi Pariwisata bahkan terbuka kepada negara lain, namun seiring berkembangnya waktu, adanya tuntutan global mengakibatkan Jepang mulai terbuka dan mendalami sektor tersebut sebagai alternative pembangunan ekonomi domestiknya. Namun sebelum itu, penulis juga akan membahas mengenai hubungan sosial budaya negara Jepang, yang mana memiliki suatu keterikatan dengan sektor pariwisata.

1. Bidang Ekonomi

Ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II semakin terlihat peningkatan dan perkembangannya. Hingga pada tahun 1970-an, Jepang tercatat sebagai negara yang maju dalam bidang industrialisasinya. Pendapatan perkapita yang diperoleh Jepang pun pada saat itu mencapai 10 kali lebih besar jika dibanding dengan GNP jumlah total gabungan dari beberapa negara di Asia Tenggara.¹ Dalam perjalanannya membangun negara, Jepang masih terus berkuat dengan berbagai cara untuk memajukan perekonomian domestiknya. Hingga menjalin beberapa aliansi dengan negara-negara lain yang sekiranya dapat membantu Jepang dalam pengembangan ekonominya. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara, dengan Sumber Daya Alam yang sangat melimpah didalamnya, yang memungkinkan tersedianya bahan mentah untuk perkembangan industri Jepang.² Hubungan diplomatik antara Jepang dengan

¹Matray I, James. 2001. "*Japan's Emergence as a Global Power*".
Wesport: Greenwood Press

²Frederic, William H; Worden Robert L. 2011. "*Indonesia a Country Study*", Federal Reaserch Division, Library of Congress

Indonesia dimulai pada April 1958, ditandai dengan perjanjian perdamaian dan pampasan perang.³ Hingga pada saat itu hubungan antar kedua negara tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat baik bahkan hingga taraf “Mitra Strategis”.

Dalam kerjasama ekonomi yang dijalankan oleh Jepang dan Indonesia, mereka menitik beratkan pada hubungan perdagangan, investasi, dan kerjasama bantuan ekonomi (ODA). Bagi Jepang, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor. Ekspor Indonesia ke Jepang mampu mencapai nilai US\$ 23,6 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Jepang berkisar US\$ 6,5 miliar tercatat pada tahun 2007. Keadaan tersebut mampu membuat Jepang mengalami surplus besar. Pada kerjasama perdagangan ini, Jepang mengimpor besar-besaran beberapa komoditi atau barang-barang hasil Sumber Daya Alam dari Indonesia seperti minyak, gas alam cair, batu bara, hasil tambang, produk tekstil, dan lain-lain. Yang menurut pandangan mereka, Indonesia merupakan negara penyimpan SDA melimpah dengan harga jual relative murah. Di samping itu, ekspor Jepang untuk Indonesia cenderung pada barang-barang jadi, seperti otomotif, barang elektronik, mesin-mesin, dan barang-barang jadi lainnya.⁴

Hubungan ekonomi tersebut tidak berhenti di situ saja, dengan dasar hubungan baik antar keduanya terjalin pula kerjasama berbagai investasi. Investasi yang dilakukan oleh kedua negara tersebut mengalami hubungan yang fluktuatif. Itu dikarenakan oleh stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia, akibat krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Terdapat kurang lebih

³“*Hubungan Indonesia-Jepang*” diakses di https://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html pada 29 Januari 2019

⁴ Ibid,

1000 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia.⁵ Hal tersebut mengakibatkan Jepang menduduki tempat pertama di Indonesia. Dengan adanya investasi tersebut, menjadikan Jepang kuat dalam mensuplai lapangan pekerjaan untuk warga negara Indonesia.

Mengenai kerjasama ekonomi, Jepang merupakan negara pemberi bantuan terbesar. Kurang lebih 45% dari nilai kumulatif ODA (Bantuan Pembangunan Pemerintah) dialokasikan untuk membantu Indonesia sejak tahun 1960. Dengan adanya Fukuda doctrine pada pasca Perang Dunia II, yang menjadikan Jepang lebih berorientasi pada negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Jepang pun sadar akan pentingnya mendorong perekonomian negara tersebut. Dengan begitu, bantuan ekonomi yang diberikan oleh Jepang diwujudkan dalam bentuk ODA. Hingga saat ini, Jepang telah memberikan bantuan untuk 190 negara dan wilayah. Dari banyaknya negara tersebut, Indonesia merupakan negara penerima bantuan terbesar sekitar 11,3% dalam kurun waktu 1960-2015.⁶ Bantuan ODA tersebut tertuang dalam tiga bagian, yaitu kesehatan, pertanian, dan transportasi. Dalam sektor transportasi, sektor tersebut dirasa merupakan bagian terpenting yang mendukung kestabilan pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu pula terjadi berbagai bentuk upaya untuk meningkatkan keterhubungan didalam wilayah Asia Tenggara. Dengan begitu, harapan terhadap Indonesia sebagai negara yang berperan dalam jaringan produksi dan perdagangan internasional semakin meningkat. Dengan diperkuatnya jaringan seluruh Indonesia, Jepang berkontribusi dalam memperkuat keterhubungan di dalam negeri hingga

⁵ JETRO. diakses di <https://www.jetro.go.jp/indonesia/TTPP.html> pada 21 Januari 2019

⁶ "Pembangunan Indonesia dan Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan". 2018. Japan International Cooperation Agency

mampu mengembangkan industri Indonesia sebagai bagian dari jejaring produksi dan perdagangan internasional.⁷ Berbagai bentuk bantuan ODA yang diberikan kepada Indonesia terbagi dalam bantuan pinjaman sebesar ¥ 125.2 miliar; bantuan Hibah ¥ 5.4 miliar; dan kerjasama teknik yaitu sebesar ¥ 7.8 miliar.⁸

Table 1 Total Jumlah Pengeluaran Akumulasi ODA

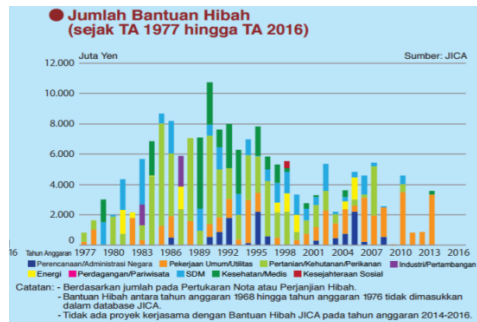


Sumber : *Japan International Cooperation Agency (JICA)*

Table 2 Total Jumlah Bantuan Hibah

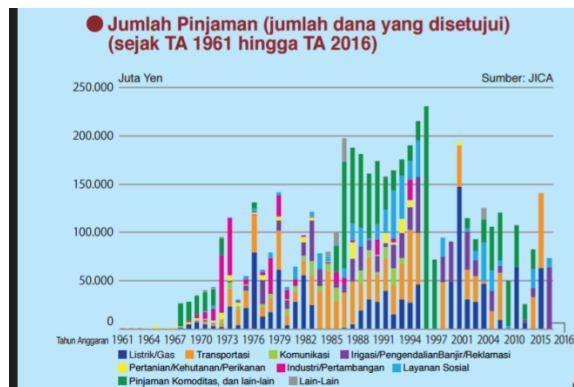
⁷ Ibid,

⁸ Ibid,



Sumber : *Japan International Cooperation Agency (JICA)*

Table 3 Total Jumlah Bantuan Pinjaman



Sumber : *Japan International Cooperation Agency (JICA)*

Pada table tersebut terlihat jelas bahwa hubungan keduanya mengalami suatu kerjasama yang baik. Untuk sektor kerjasama ekonomi, Jepang berkontribusi juga terhadap stabilisasi ekonomi dan koordinasi struktural di Indonesia, melalui kerjasama keuangan dan teknis sejak tahun 1960-an hingga sekarang.

2. Bidang Sosial-Budaya

Untuk membahas mengenai studi kasus hubungan kerjasama pariwisata antara Jepang dengan Indonesia, perlu kita ketahui terlebih dahulu hubungan sosial budaya antar kedua negara, sehingga dapat memunculkan sektor pariwisata sebagai alternative lain untuk membangun hubungan dengan penerapan *soft diplomacy*. Hal tersebut dikarenakan sektor Pariwisata tanpa adanya keterkaitan dengan Kebudayaan, akan menjadikan sebuah wisata yang hanya rekreasi semata saja. Terdapat adanya keterkaitan antara satu sama lain, dengan adanya budaya didalamnya, perjalanan pariwisata pun semakin terlihat berbagai manfaatnya selain untuk rekreasi.

a. Kerjasama Sektor Budaya

Kerjasama dalam sektor budaya merupakan salah satu cara yang dilakukan Jepang dalam membangun sebuah hubungan dengan negara lain salah satunya Indonesia. Kerjasama bentuk *soft diplomacy*, dipilih Jepang setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II. Pada hubungan kerjasama sektor budaya ini, Jepang menginisiasi sebuah bentuk lembaga yang memiliki tujuan sebagai sarana pertukaran kebudayaan negara Jepang. lembaga tersebut adalah *The Japan Fundation*, yang tercetus pada oktober 1972 di Tokyo. Lembaga tersebut telah memiliki beberapa cabang, salah satunya di Jakarta, Indonesia yang dibuka pada tahun 1974.⁹ Lembaga tersebut diinisiasi sebagai bentuk inovasi baru dalam melakukan hubungan kerjasama dibidang kebudayaan yang tidak melulu mengenai ekonomi dan politik saja. Adanya kerjasama tersebut diyakini dapat membangun citra baik Jepang di negara-negara

⁹The Japan Fundation, Jakarta. diakses di <http://www.jpff.or.id/office/> pada 20 Februari 2019

Asia. Selain itu, Jepang dan Indonesia juga melakukan hubungan kerjasama dalam sektor pariwisata. Sektor Pariwisata mampu berdiri sendiri sebagai suatu industri yang mulai berperan dalam pengembangan hubungan antar negara dan ikut berperan dalam ekonomi domestik. Dimana sektor pariwisata diyakini dapat menjadi sebuah alternative lain untuk Jepang dalam membangun hubungan dengan negara lain termasuk Indonesia melalui penerapan *soft diplomacy* nya.

b. Kerjasama Sektor Pariwisata

Hubungan kerjasama pariwisata yang dilakukan oleh Jepang dengan Indonesia telah terjalin dengan baik, ditandai oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri atas penandatanganan perjanjian kerja sama pariwisata dengan Jepang pada tahun 2003 lalu, tepatnya pada 23 Juni di Jepang.¹⁰

Perjanjian tersebut sebagai bentuk dari upaya yang dilakukan oleh kedua negara untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Dalam upaya tersebut, Jepang dan Indonesia menggunakan cara kampanye yang terukur, digunakan juga pertukaran misi sebagai promosi pariwisata dan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pada kerja sama ini, diharapkan juga terdapat adanya peningkatan kerjasama sosial, ekonomi, dan budaya antar kedua negara tersebut nantinya.

¹⁰Tempo.co. 2003. “Indonesia-Jepang Tandatangani Kerjasama Pariwisata” diakses di <https://nasional.tempo.co/read/20571/indonesia-jepang-tandatangani-kerjasama-pariwisata/full?view=ok> pada 29 Januari 2019

Telah lama Jepang beranggapan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Animo perjalanan dengan tujuan wisata oleh warga negara Indonesia pun sangat besar, dengan semakin baiknya hubungan antar kedua negara, Jepang pun mengeluarkan sebuah kebijakan yang mempermudah warga negara Indonesia pada 1 September 2012, yaitu kebijakan pemberian *Multiple Visa* bagi warga negara Indonesia yang berencana melakukan perjalanan sementara ke Jepang. Kebijakan tersebut kemudian mengalami suatu revisi, dimana yang semula WNI hanya mendapat 15 hari kunjungan kemudian diperpanjang menjadi 30 hari kunjungan terhitung sejak 1 Juli 2013 lalu. Dengan semakin baiknya hubungan antara Jepang dengan Indonesia, Pemerintah Jepang akhirnya mengeluarkan kebijakan baru yang sekaligus untuk menunjang sektor pariwisata negaranya, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan bebas visa, yang salah satu sasaran wisatawan asing Jepang adalah Indonesia.

B. Kebijakan Bebas Visa ke Jepang

Ketika membangun perekonomian Jepang dengan *soft diplomacy* melalui sektor pariwisata, kebijakan bebas visa pun diterapkan Jepang dalam upaya merealisasikan kebijakan pariwisata negaranya. Karena dalam melakukan perjalanan wistapun tidak dapat terlepas dari sebuah Visa. Visa merupakan hal penting yang tidak dapat dihiraukan keberadaannya untuk para warga negara yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Pada bagian ini, penulis akan terlebih dahulu membahas mengenai kebijakan visa (normal) kemudian dilanjutkan dengan kemunculan kebijakan bebas visa untuk beberapa negara termasuk Indonesia.

1. Kebijakan Visa Jepang

Untuk dapat melakukan sebuah perjalanan keluar negeri, yang berdasar aturan dari petugas keimigrasian Jepang, mengenai pengakuan tindakan (*Recognition Act*), warga negara asing yang berkunjung ke Jepang atau hanya sekedar masuk saja diwajibkan untuk memiliki *Passport Valid* yang dikeluarkan oleh pemerintahan resmi. Hal tersebut disebabkan karena *Passport* merupakan suatu dokumen penting sebagai bukti autentifikasi data identitas diri seseorang. Di samping itu, visa merupakan suatu rekomendasi yang diberikan kepada warga negara asing untuk dapat masuk ke Jepang.¹¹ Namun, hal tersebut bukanlah suatu jaminan untuk warga negara asing dapat dengan leluasa keluar masuk Jepang. Dapat atau tidaknya akan ditentukan oleh pihak keimigrasian Jepang setelah warga negara asing tersebut tiba di Jepang. Dalam pengeluaran visa, ada beberapa kriteria yang wajib dimiliki oleh warga negara asing, diantaranya a.) Pemohon memiliki passport yang berlaku dan berhak masuk kembali ke negara dimana ia tinggal b.) Seluruh dokumen harus asli dan lengkap c.) Segala kegiatan yang dilakukan warga negara asing di Jepang harus memenuhi syarat dalam *Immigration Control and Refugees Recognition Act*.¹²

Pemberian izin masuk ke Jepang memiliki sebuah aturan yang panjang. Hal tersebut dikarenakan sebagai upaya pencegahan adanya terorisme yang masuk. Peraturan tersebut tertuang dalam UU

¹¹“*Kedutaan Besar Jepang di Indonesia*” diakses di <https://www.id.emb-japan.go.jp/visa.html>, pada 31 Januari 2019

¹² *Ibid*,

Pengawasan Keimigrasian dan Pengungsian. Dimana terdapat suatu prosedur warga negara asing untuk diambil rekam sidik-jari dan foto muka agar warga negara asing tersebut dapat lolos masuk ke Jepang.¹³

Di samping itu, terdapat pula kebijakan penerbitan visa Jepang. Dalam peningkatan kesempatan yang diberikan pemerintah Jepang, beberapa upaya telah dilakukan untuk menyederhanakan prosedur pemeriksaan terhadap setiap permohonan visa Jepang. Namun, pemeriksaan permohonan visa tersebut dilakukan Jepang masih dengan cara ketat. Hal tersebut merupakan sebuah upaya Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jepang untuk mencegah terjadinya *human trafficking* (perdagangan manusia).¹⁴ Jadi dengan visa normal yang diterapkan oleh Jepang prosedur untuk mendapatkan izin masukpun masih terlampau panjang. Namun berbeda ketika Jepang mulai menerapkan *E-Passport* sebagai syarat kebijakan visa yang disederhanakan oleh Jepang untuk beberapa negara dalam bentuk kebijakan bebas visa.

2. Kebijakan Bebas Visa ke Jepang

Sebelum membahas mengenai kebijakan *Visa Waiver* atau bebas visa, terlebih dahulu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut muncul. Seperti yang telah disampaikan diatas, adanya kebijakan bebas visa yang diberikan kepada beberapa negara termasuk Indonesia, merupakan sebuah bentuk yang dijalankan oleh Jepang untuk merealisasikan

¹³“Kedutaan Besar Jepang di Indonesia”, diakses di https://www.id.emb-japan.go.jp/visa_prd.html pada 31 Januari 2019

¹⁴“Kebijakan Visa Jepang”, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia diakses di http://www.id.emb-japan.go.jp/visa_plcy.html pada 31 Januari 2019

kebijakan pariwisata yang tertuang pada agenda besar *Abenomic Growth Strategy*. Agenda besar tersebut pun tidak datang dengan sendirinya. Latar belakang kemunculan *Abenomic Growth Strategy* dikarenakan stagnasi yang dialami negeri Sakura ini selama 20 tahunlamanya. Ada dua bagian dalam permasalahan ekonomi yang membuatnya stagnasi. Di antaranya yaitu deflasi yang terjadi berulang-ulang dan tidak adanya penekanan oleh masyarakat Jepang mengenai tingkat kelahiran agar tidak terjadi penambahan mengenai rasio kematian penduduk, yang mana di Jepang saat itu banyak masyarakat lanjut usia yang mengakibatkan kurangnya tenaga kerja disana.¹⁵ Dengan begitu, muncullah kebijakan pariwisata untuk membangkitkan perekonomian negara Jepang, yang tertuang dalam kebijakan *Abenomic Growth Strategy*.

Abenomic Growth Strategy terbagi menjadi tiga bagian yang disebut dengan *Three Arrows* (tiga pilar ekonomi) yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Shinzo Abe II.¹⁶ Bagian tersebut terpecah lagi dalam bentuk *first arrow*, *second arrow*, dan *third arrow* (dimana kebijakan pariwisata tertuang didalamnya hingga memunculkan kebijakan bebas visa). Di dalam *Third Arrow*, terdapat suatu promosi yang disebut *The Tourism National Promotion Basic Plan*. Kebijakan tersebut berisi mengenai keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pariwisata di negara Jepang dengan cara menanamkan berbagai pemahaman antar budaya dan meningkatkan kepuasan para wisatawan

¹⁵Resjito Putra, Meggy. 2016. “*Bab II Kebijakan Pariwisata Jepang*” (Skripsi) diakses di <http://eprints.umm.ac.id/36155/3/jiptumpp-gdl-meggyresji-47493-3-babii.pdf> pada 31 Januari 2019

¹⁶ Ibid,

asing.¹⁷ Dalam *Third Arrow* terdapat lima inti didalamnya.¹⁸ Point ke lima pada *Third Arrow* tersebut adalah *Cool Japan*, yang berisi berbagai promosi dari pemerintah mengenai kebudayaan, makanan dan sector pariwisata negara Jepang ke seluruh dunia. Di adakannya program *Cool Japan* dibawah naungan *Abenomic Growth Strategy* atas penargetan pemerintah untuk menarik 20 juta wisatawan asing di tahun 2020 dan 30 juta wisatawan asing di tahun 2030 mendatang. Dengan adanya point ke lima, program *Cool Japan* tersebut tercetus adanya kebijakan bebas visa yang diberikan kepada warga negara asing termasuk Indonesia.

Untuk menguatkan kelima inti di atas sebagai upaya untuk merealisasikan kebijakan pariwisata negara Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe membahas beberapa hal mengenai pembangunan industri pariwisata, dalam pertemuannya dengan beberapa Menteri Jepang, yang kemudian menghasilkan beberapa poin didalamnya.¹⁹ Point ke dua dalam pembahasan tersebut adalah pembahasan mengenai bebas visa. Kebijakan pembebasan visa tersebut bertujuan untuk meingkatkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Jepang. “*Increasing the Number of Non-Japanese Tourist by Relaxing Visa Requirements and Undertaking*”.²⁰ Point tersebut

¹⁷Ministry of Land, Infrastructure, Tourism and Transportation of Japan, 2016, diakses di <http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/kankonkkoku/> pada 31 Januari 2019

¹⁸Op,cit

¹⁹Kantei Japan. 2016. “*Overview 1. The Basic Concept of the Growth Strategy*”, diakses di http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/en_saikou_jpn.pdf pada 31 Januari 2019

²⁰Ibid,

semakin diperkuat dan disampaikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe sendiri pada pertemuannya dalam sesi “Diet” Jepang yang mana merupakan sebuah lembaga legislative tertinggi pemerintah yang mempertemukan eksekutif tertinggi (PM Shinzo Abe) dan seluruh anggota parlemen dalam satu konsesi resmi.

Dalam penerapan kebijakan bebas visa Jepang, ada beberapa negara terpilih yang mendapatkan kebijakan tersebut. Namun dalam pengaplikasian kebijakan bebas visa, diharuskan warga negara asing untuk memiliki *E-Passport*, yang dapat dibuat di Kedutaan Besar terlebih dahulu. Dengan *E-Passport* tersebut, warga negara asing tidak perlu untuk mengaplikasikan visa lagi. Berikut adalah table negara-negara yang mendapat bebas visa pada 2014, termasuk didalamnya yaitu Malaysia dan Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk Muslim.²¹

²¹Resjito Putra, Meggy. 2016. “*Bab II Kebijakan Pariwisata Jepang*” diakses di <http://eprints.umm.ac.id/36155/3/jiptummpp-gdl-meggyresji-47493-3-babii.pdf>

Table 4 Daftar Negara Penerima Visa Entry Jepang Tahun 2014

ASIA	Indonesia , Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Singapur, Brunei, Makau
EROPA	Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Prancis, Italy, Inggris
AMERIKA UTARA	Amerika Serikat, Kanada
OCEANIA	Argentina, Mexico, Suriname, Uruguay, Chile, Costa Rica, Honduras
TIMUR TENGAH	Israel, Turki
AFRIKA	Tunisia, Mauritius, Lesotho

Sumber :

https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html

Kebijakan bebas visa pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, pertama kali diberikan kepada dua negara Asia Tenggara, yaitu Thailand dan Malaysia pada 1 Juli 2013 dengan tujuan wisata atau kunjungan singkat. Di Thailand sendiri berlaku untuk masa tinggal kurang dari 15 hari, sementara Malaysia, berlaku kunjungan kurang dari 3 bulan.²²

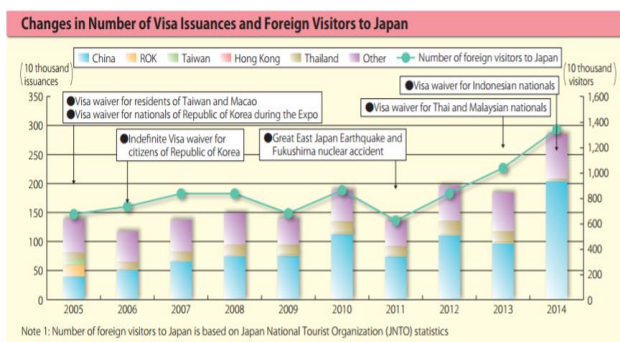
3. Kebijakan Bebas Visa untuk Indonesia

Kebijakan bebas visa yang diberikan kepada beberapa negara termasuk Indonesia merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan Jepang untuk mengembangkan sektor pariwisata di negaranya. Di mana visa yang dibebaskan adalah visa Kunjungan sementara atau wisata. Bebas visa untuk negara

²²“*Exemption of Visa (Short-Term Stay)*” diakses di https://mofa.go.jp/i_info/visit/visa/short/novisa.html pada 25 Januari 2019

Indonesia diresmikan pada tanggal 1 Desember 2014, berlaku kurang dari 15 hari.²³

Table 5 Penetapan *Visa Waiver* untuk Indonesia Tahun 2014



Sumber : *JNTO*

Seperti yang tercantum pada table diatas. Di mana pada saat itu, Dubes RI untuk Jepang Dr. Yusron Ihza Mahendra berharap dengan adanya kebijakan tersebut dapat memudahkan warga negara Indonesia mengenal lebih dekat Jepang sekaligus menambah wawasan warga negara Indonesia yang berkunjung ke Jepang. Tujuan utama dari pembebasan visa tersebut adalah mendorong pariwisata Jepang yang menargetkan 20 Juta pada 2020, dan 30 Juta pada 2030 warga negara asing yang datang ke Jepang. Hal tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama antar kedua negara, tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, namun juga bidang yang lain.

²³ “Konsulat Jendral Jepang di Surabaya” diakses di https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_id/visa_waiver.html pada 26 Januari 2019

Pemerintah Jepang yang menilai bahwa banyaknya wisatawan dan pekerja profesional dari Jepang yang berkunjung ke Indonesia, dan pandangan mereka akan animo masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata ke luar negeri sangatlah tinggi. Oleh karena itu, sebagai bentuk sebuah apresiasi sekaligus perayaan 40 tahun persahabatan Jepang dengan Indonesia, pemerintah Jepang pun memberikan kemudahan warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Jepang dengan pemberlakuan Kebijakan bebas visa.²⁴

Pemberian bebas visa Jepang tersebut memiliki ketentuan didalamnya, dimana bebas visa dapat diterapkan oleh warga negara Indonesia yang memiliki *IC Passport/ E-Passport* (Passport dengan logo chip dibagian sampul depan), sesuai dengan standar ICAO (*International Civil Aviation Organization*) dan telah melakukan registrasi *E-Passport* di Kantor Perwakilan Negara Jepang (Kedutaan Besar Jepang/ Konsulat Jendral Jepang/ Kantor Konsulat Jepang) atau JVAC di Indonesia sebelum keberangkatan,²⁵

Hal tersebut bukanlah syarat yang sulit, karena Badan Imigrasi Indonesia telah mengeluarkan dua jenis passport, yaitu paspor biasa dan paspor elektronik. Di mana perbedaan dalam bentuk fisiknya hanya terletak pada logo chip dibagian depan paspor. Namun dalam chip yang terdapat di *E-Passport* tersimpan informasi awal dari seorang WNI yang akan masuk ke Jepang

²⁴Al Jamil, Aditya. 2014. "*Motivasi Pemerintah Jepang Dalam Rencana Pemberian Bebas Visa Bagi Turis Asal Indonesia*", JOM FISIP Vol. 2 No. 2

²⁵"*Bebas Visa dengan Sistem Registrasi Pra-keberangkatan bagi Warga Negara Indonesia Pemegang e-paspor*" diakses di https://www.id.emb-japan.go.jp/visa_waiver2018.html pada 28 November 2018

dalam perekaman data biometric, yang kemudian berfungsi sebagai pengganti proses aplikasi visa.²⁶ *E-Passport* telah di terapkan Pemerintah Indonesia dengan resmi pada tahun 2013. *E-Passport* ini memiliki data yang sangat akurat dan lengkap jika dibandingkan dengan paspor biasa, didalamnya terdapat data biometrik yang akurat dan tidak dapat di manipulasi keasliannya. Data biometrik sendiri merupakan suatu kumpulan data dari pemilik paspor. Seperti sidik jari, dan bentuk wajah pemilik paspor yang dapat dikenali dengan pemindaian sehingga memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan paspor biasa, berikut adalah perbedaan antar kedua passport tersebut.²⁷

Gambar 1 Perbedaan Passport Biasa dengan E-Passport



Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai bagaimana dinamika hubungan bilateral negara Jepang

²⁶ Ibid,

²⁷“*Apa beda E-Paspor dengan Paspor Biasa*” diakses di <https://travel.kompas.com/read/2016/04/27/170300627/Apa.Beda.E-Paspor.dan.Paspor.Biasa> . pada 27 Januari 2019

dan Indonesia. Adanya fukuda doktrin yang telah dibahas pada bab sebelumnya, berakibat pada pengembangan kerjasama antara Jepang dengan Indonesia. Kerjasama yang akan diulas adalah kerjasama ekonomi dan kerjasama pariwisata, namun sebelum itu penulis juga membahas mengenai kerjasama Jepang-Indonesia dalam bidang sosial-budaya. Hal tersebut dikarenakan latar belakang kekalahan Jepang pada Perang Dunia II yang berakibat dalam membangun negaranya, Jepang diperbolehkan melakukan aliansi dengan *soft diplomacy* tanpa menggunakan kekuatan militer. Yang kemudian memunculkan ekonomi kreatif Jepang pada sektor pariwisata. Dalam membangun sektor pariwisata, Jepang melakukan berbagai upaya salah satunya dengan memberikan kebijakan bebas visa kepada beberapa negara terpilih termasuk Indonesia pada tahun 2014.